BAB II

TUJUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi

Standar akutansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.[27] Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.[28]

Penetapan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan menjadi PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun berdasarkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, merupakan upaya utuk menyamakan sikap dan visi dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut terdahulu, dalam paradigma pemerintahan daerah yang bertumpu pada nilai demokratis,

[27] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hal. 148
[28] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

pemberdayaan, dan pelayanan.[29] Sehingga standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.[30]

b. Basis Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD.[31] SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Penerapan berbasis akrual tersebut dijelaskan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan.

Standar akuntansi berbasis akrual pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau

---

[29] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

[30] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.138

[31] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

dicatat ketika transaksi terjadi.[32] Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Hal yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dilakukan pencatatan, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk dan keluar dimasa depan. Transaksi dicatat saat terjadi, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.[33] Pada akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi. basis akrual juga mendukung penggunaan anggaran sebagai teknis pengendalian.[34]

Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Sesuai dengan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterim atau dibayar.

---

[32] Drs. H. Soeradi, M.M, *Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual*, (yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hal. 16

[33] Ibid, hal. 16

[34] Drs. H. Soeradi, M.M, *Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual*, (yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hal. 17

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :

1) Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
2) Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
3) Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
4) Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.
5) Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
6) Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan entitas.
7) Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

c. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat kerangka konseptual dan dua belas PSAP sebagai berikut:[35]

[35] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan keuangan

Laporan keuangan disusun secara terstruktur untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Penyajian laporan keuangan adalah menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi.

2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang. Penyajian laporan realisasi anggaran adalah menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.

3) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama

periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris. Penyajian laporan arus kas adalah menyusun dan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan SAP dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.

4) PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian catatan atas laporan keuangan adalah menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.

5) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemeritah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan akuntansi persediaan adalah mengakui dan mencatat

persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.

6) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Pengakuan akuntansi investasi adalah mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.

7) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya pemerolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan akuntansi aset tetap adalah mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.

8) PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai. Perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan.

9) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Perlakuan akuntansi kewajiban adalah mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul.

10) PSAP No. 10 Koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Kesalahan dalam penyusunan laporan

keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

11) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi

12) PSAP No. 12 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan operasional adalah

pendapatan, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Penyajian laporan operasional adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Kompetensi Pegawai

a. Pengertian Kompetensi Pegawai

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut McClelland mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat memprediksikan kinerja yang baik.[36]

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam palan adalah karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan.[37]

Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia

[36] Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan,* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hal. 299

[37] Hendy Tannady, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Expert, 2017), hal. 385

menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari kejelian dan ketepatan dalam proses menentukan seorang pegawai untuk berada dalam suatu pekerjaan dan jabatan tertentu. Pegawai yang mampu melakukan pekerjaan tertentu mungkin akan lebih tepat dan baik jika dia ditempatkan pada bidang tertentu juga. *The right man on the right place*, akan membawa suatu organisasi pada hasil kinerja yang maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam tugas atau pekerjaan.[38] Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.[39]

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46 A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seoarang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atupun jabatan, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.[40] Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat

[38] Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hal. 2
[39] Ibid, hal.4
[40] Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A Tahun 2007. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif.[41]

Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya.[42] Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada situasi dan tugas pekerjaan (*job tasks*).[43]

Kompetensi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1) Bakat bawaan
2) Motivasi kerja tinggi
3) Sikap, motif dan cara pandang
4) Pengetahuan yang dimiliki
5) Ketrampilan atau keahlian yang dimiliki
6) Lingkungan hidup dari kehidupan sehari-hari

---

[41] Hendy Tannady, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Expert, 2017), hal. 388

[42] Ibid, hal. 389

[43] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Komputer,* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 4

Pegawai adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.[44]

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kompetensi pegawai adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang terdapat dalam diri seseorang dan mempengaruhi terhadap kinerja seseorang untuk mencapai tujuannya dan menyelesaikan tugas pekerjaannya.

b. Indikator Kompetensi Pegawai

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.[45] Sehingga indikator yang diunakan dalam menilai kompetensi pegawai sebagai berikut:

1) Kompetensi

kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seoarang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

[44] Fauzie Rahman, Husaini, H. Syamsul Arifin, Lenie Marlinae, Anggun Wulandari, Hadianor, *Perilaku Pegawai*, (Yogyakarta: Expert, 2017), hal. 11

[45] Galuh Fajar D., Deviana, "Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah", *jurnal WRA*, Vol.1 No. 1 April 2013, hal. 23

tugas atupun jabatan, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

2) Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapan pun didunia terdapat pendidikan. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

3) Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Perkembangan teknologi sangatlah pesat dan telah menyebabkan beberapa perubahan didalam berbagai bidang. Perkembangan sistem teknologi informasi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi. perubahan yang terjadi yaitu dari sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi yang akan digunakan untuk memproses data-data keuangan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat serta berpotensi

memanfaatnkannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan atas informasi data keuangan dan data lainnya yang akan diubah menjadi dalam sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat dilakukan dengan dua macam yaitu manual ataupun terkomputerisasi.[46] Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.[47]

Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.[48] Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkan.[49]

---

[46] George H. Bodnar dan william S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi,* (Yogyakarta : Andi, 2006), hal. 3

[47] Khutbatul Jannah dan Dedi Suselo, "Applicatian Of Inventory Accounting Information System Effort To Improve Internal Control Material Warehouse At Modjopanggong Sugar Plant, Tulungagung", *Balace:Journal Of Islamic accountin,* Vol. 01, No. 01, 2020, hal. 54

[48] Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 4

[49] ibid

Sistem Informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber daya (teknologi informasi, software, dan sumber daya manusia) yang dirancang untuk mengubah sebuah data keuangan menjadi sebuah sistem informasi.[50] Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang paling penting di organisasi dan merubah cara menangkap, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi.[51] Pada dasarnya Sistem Informasi Akuntansi itu sangat penting bagi perusahaan karena bertujuan untuk mengelola seluruh data keuangan perusahaan menjadi sebuah informasi yang sangat penting bagi perusahaan itu sendiri. Informasi ini dapat digunakan oleh pemakai untuk mengurangi tingkat resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan didasarkan pada sistem informasi akuntansi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien dapat membantu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi terhadap investor (pihak eksternal).

Menurut Silviana menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah lebih dikenal dengan Sistem Informasi

---

[50] George H. Bodnar dan william S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta : Andi, 2006), hal. 3

[51] Mujilan, *Sistem Informasi Akuntansi (Teori dan Wawasan di Dunia Elektronis)*, (Madiun: Universitas Widya Mandala, 2015), hal. 3

Keuangan Daerah (SIKD).[52] Berdasarkan PP No. 65 tahun 2010 menyatakan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola data keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2010, Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi akuntansi daerah dengan tujuan, sebagai berikut:

1) Membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah
2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan
3) Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah
5) Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat

b. Indikator Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern

[52] Silviana, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survei Pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat", *PROFIITA*, Vol. 6 No. 1 April 2014, hal. 29

lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Menurut Arlia, indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah :[53]

1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.

   Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

2) Tingkat keamanan, kecepatan, dan ketepatan

   Dalam suatu sistem informasi keamanan sangat diutamakan, karena sistem keamanan ini dapat mencegah penggunaan sumber daya yang tidak sesuai, serta tindakan pencurian sumber daya sistem. Sistem informasi akuntansi dapat mengelola sebuah data dengan tepat, akurat, dan tepat waktu.

3) Tingkat Kualitas hasil

   Sistem informasi yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu dan diotorisasi. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang baik

[53] Arlia Sari Artana, *Skripsi: Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah DKI Jakarta)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hal. 31

maka akan menghasilkan sebuah informasi keuangan yang sesuai dengan standar.

4. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah "Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan". Jadi laporan keuangan merupakan informasi yang digunakan untuk menggambarakan kinerja suatu entitas yang biasanya diterbitkan setiap tahun.

Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan.[54]

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Jadi

[54] Drs. Pirmatua Sirait, S.E., M.Si., *Pelaporan dan Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 19

laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan kondisi keuangan dari perusahaan/instansi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas merupakan tingkat atau taraf baik buruknya sesuatu. Kualitas dalam hal ini berarti merupakan tingkat baik buruknya kondisi keuangan organisasi/pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangannya.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan karakteristik kualitatif dari suatu laporan yang menyajikan mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta informasi lain yang merupakan hasil proses akuntansi selama periode tertentu yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik Kualitatif dalam laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut standar akuntansi pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, ataupun politik.

Tujuan dari pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah:[55]

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan

[55] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*, Hal. 26

2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4) Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Indikator dari kualitas laporan keuangan

menuru PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan[56], meliputi:

1) Dapat dipahami

   Dapat dipahami artinya bahwa suatu informasi yang disajikan di laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Berdasarkan hal tersebut, maka pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dalam lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2) Relevan

   Suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mengevaluasi kejadian masa lalu atau masa kini serta memprediksi masa depan, dan mengoreksi hasil evaluasi. Informasi yang relevan mengandung beberapa unsur yaitu meliputi:

   a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

      Artinya bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk menegaskan atau mengoreksi peristiwa di masa lalu.

[56] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Artinya bahwa informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Artinya bahwa informasi tersebut disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Memiliki arti bahwa informasi keuangan yang disajikan selengkap mungkin agar memudahkan pengguna yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

3) Keandalan

Keandalan suatu informasi tergantung pada kemampuan informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman ada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi. Informasi yang andal mencakup unsur-unsur berikut:

a) Penyajian jujur

Penyajian yang jujur menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan juga harus bebas dari unsur bias.

b) Dapat diverifikasi

maksudnya bahwa apabila kemampuan informasi tersebut duiji oleh orang yang berbeda, namun dengan menggunakan metode yang sama, maka akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

c) Netralitas

Artinya bahwa di dalam penyajian laporan keuangan tidak ada unsur bias. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4) Dapat dibandingkan

Suatu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan dapat berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan tersebut dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi

yang sama. Jika entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu[57]:

1) Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari:

a) Pendapatan-LRA

Penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

b) Belanja

[57] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

c) Transfer

Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

d) Pembiayaan

Setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari:

a) Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Laporan operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang tercantum dalam laporan operasional yaitu:

a) Pendapatan-LO

Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban

Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

c) Transfer

Hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Pos luar biasa

Pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5) Laporan arus kas

Menyajikan informasi arus kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari:

a) Penerimaan kas

Semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum.

b) Pengeluaran kas

Semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum.

6) Laporan perubahan ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas laporan keuangan

Merupakan penjelas naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CALK mengungkap/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengungkapan informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi

b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keunagan
f) Mengungkap informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka lapoarn keuangan
g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan kajian-kajian penelitian terdahulu yag mengkaji mengenai kualitas laporan keuangan. Pada penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk melengkapin penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi, 2016, dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa peran

teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan secara simutan faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan lokasi penelitian berbeda. Kesamaan dengan penelitian ini adalah variabel pemanfaatan SIA, kompetensi SDM.[58]

Lia Hanifa, 2016, dengan judul Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Laporan Keuangan. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu penerapan SAP, dan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Objeknya pada penelitian terdahulu pada SKPD di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan pada penelitian sekarang objeknya pada pegawai BPPKAD Kota Kediri. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu kompetensi SDM atau Pegawai.[59]

---

[58] Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang", *KINERJA*, Vol. 20, No. 2, 2016

[59] Lia Hanifa, "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 77

Danang Wahyu Pribadi, 2018, dengan judul Pengaruh Kinerja Pengelola Keuangan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kediri. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa: Kinerja pengelola keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kinerja pengelola keuangan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen ini yaitu kompetensi pegawai, penerapan SAP, dan pemanfaatan SIA. Pada penelitian sama-sama bertempat di BPPKAD Kota Kediri.[60]

Riedy Riandani, 2017, dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di daerah Kabupaten LimaPuluh Kota. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Limapuluh Kota. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintahan kabupaten Lima Puluh Kota. Perbedaan dengan penelitian ini

[60] Danang Wahyu Pribadi, "Pengaruh Kinerja Pengelola Keuangan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kediri", *Jurnal Simki-Economic*, Vol. 02, No. 07, 2018, hal. 9

terletak pada variabel independen pada penelitian terdahulu sistem pengendalian intern pada penelitian sekarang variabel penelitiannya penerapan Standar akuntansi pemerintahan, dan pemanfaatan Sistem informasi akuntansi. Objeknya pada penelitian terdahulu pada SKPD Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan pada penelitian sekarang objeknya pada pegawai BPPKAD Kota Kediri. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu kompetensi SDM/ pegawai.[61]

Ratna Wijayanti, 2017, dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan dan dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 16 SKPD di Kabupaten Madiun, maka diperoleh kesimpulan yaitu: menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu penerapan SAP, dan pemanfaatan SIA. Objeknya pada penelitian terdahulu pada 16 SKPD Kabupaten Madiun, sedangkan pada penelitian sekarang objeknya pada pegawai BPPKAD Kota Kediri. Kesamaan dengan penelitian ini pada variabel independen yaitu kompetensi SDM.[62]

---

[61] Riedy Riandani, "Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)", *Jurnal akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 50

[62] Ratna Wijayanti, "Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 3, 2017, hal. 1305

Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, 2020, dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Badung. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Badung berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu kompetensi pegawai, penerapan standar akuntansi pemerintahan. Objeknya pada penelitian terdahulu pada BPKAD Kabupaten Badung, sedangkan pada penelitian sekarang objeknya pada pegawai BPPKAD Kota Kediri. Kesamaan ddengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu pemanfaatan sistem informasi akutansi.[63]

Mayang Wulandari, 2018, dengan judul "Pengaruh Penerapan SAP Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi" peneliti ini menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik SAP yang diterapkan maka akan

[63] Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Informasi Akuntansi, dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, 2020, hal. 177

menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Solok Selatan. Perbedaannya pada penelitian ini tidak terdapat variabel moderasi. Terdapat penambahan variabel independen yaitu pemanfaatan SIA. objek penelitian juga berbeda penelitian ini dilakukan di BPPKAD Kota Kediri. Kesamaan terdapat pada variabel independen yaitu penerapan SAP, kompetensi SDM.[64]

Surya Adhitama, 2017, dengan judul Pengaruh Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir. Menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan terletak pada objek, penelitian terdahulu pada pemerintah daerah Ogan Ilir, sedangkan dalam penelitian ini pada pemerintah Kota Kediri dengan studi pada BPPKAD Kota Kediri. Kesamaan terletak pada variabel penerapan SAP, kompetensi SDM.[65]

Siska Marini P., David Paul Elia S., Hendrik Gamaliel, 2018, dengan judul Pengaruh Penerapan SAP, Sistem pengendalian Intern, Kompetensi pegawai

---

[64] Mayang Wulandari, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Solok Selatan)", *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 3, No. 3, 2018

[65] Surya Adhitama, "Pengaruh Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir", *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 5, No. 2, 2017

dan pemanfaatan teknologi informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Mobagu. Menyimpukan hasil pengujian variabel penerapan SAP diperoleh nilai *p value* sebesar 0,003 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Kotamobagu. Variabel sistem pengendalian intern diperoleh nilai *p value* sebesar 0,000 < 0,05 maka sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Kotamobagu. Variabel kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan diperoleh nilai *p value* sebesar 0,000 < 0,05 maka kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Kotamobagu. Variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan diperoleh nilai *p value* sebesar 0,007 < 0,05 maka pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Kotamobagu. Perbedaan pada penelitian terdapat variabel independen pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Objek penelitiannya berbeda pada penelitian terdahulu pada SKPD Kota Mobagu, sedangkan penelitian ini BPPKAD Kota Kediri. Kesamaan terletak pada variabel independen yaitu penerapan SAP, Kompetensi SDM.[66]

[66] Siska Marini P., David Paul Elia S., Hendrik Gamaliel, "Pengaruh Peneraan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem pengendalian Intern, Kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Mobagu", *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill",* Vol 9, No.2, 2018

C. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka konseptual

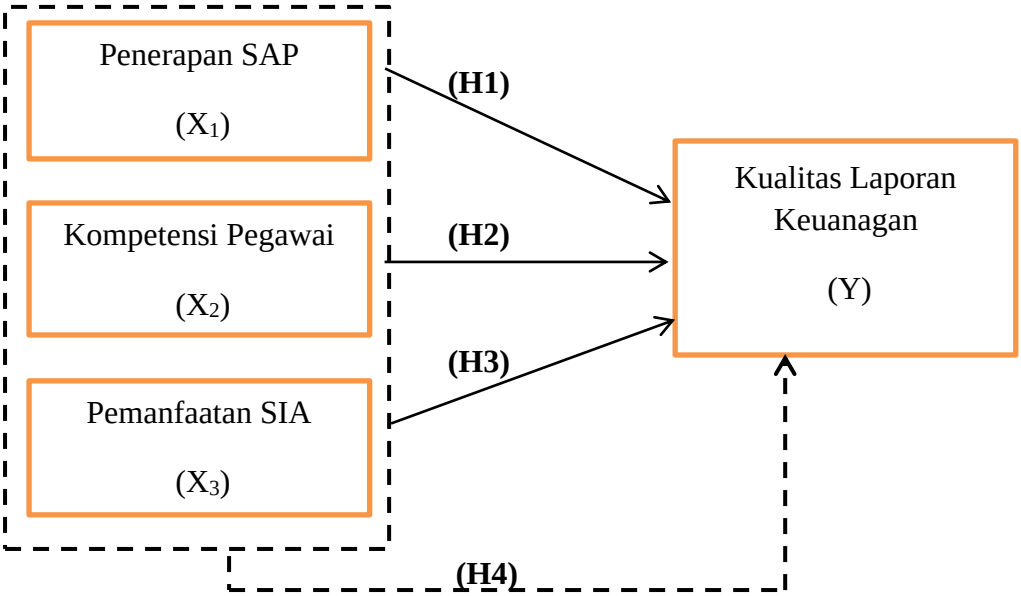

Keterangan

⟶ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

- - - -> = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Pegawai, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka piker yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.[67]

Hipotesis penelitian jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat karena masih diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri

Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2005 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dengan berbasis akrual pernyataan tersebut di atur dalam PP No.24 Tahun 2005 lalu mengalami perubahan menjadi PP No. 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman yang berlaku dalam rangka menyusun laporan keuangan. sehingga laporan keuangan akan berkualitas apabila penyusunannya sesuai dengan SAP.

H1 : penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri

[67] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 96

Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri

Sejalan dengan otonomi pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat kepada pemerintahan daerah semakin meningkat. Pemerintahan harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu tanggungjawab *good governance* pemerintah harus menyediakan informasi bagi penyedia dana dan pemakai lain. Guna memenuhi tanggungjawab maka dibutuhkan sumber daya manusia atau pegawai dalam penyusunan laporan. Pegawai akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

H2 : kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri

Ada suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Maka pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah akan menjadi salah satu cara dalam memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data yang akurat, efisien, dan terjamin kemanannya, serta sebagai

alat komunikasi antar manajemen secara cepat dan terkoordinasi sehingga dapat mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang berkualitas.

H3 : pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Pegawai, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi pemakai untuk pengambilan keputusan. Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemakai, maka informasi laporan keuangan yang disajikan harus memiliki karakteristik kualitatif yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang memiliki karakteristik tersebut tentunya harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. selain itu, dalam penyusunan harus didukung oleh pegawai yang kompeten di bidang akuntansi. pemanfaatan siste informasi akuntansi yang sangat dibutuhkan karena sistem tersebut sebagai sarana dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkulitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Pegawai, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.`

H4 : penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri